

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Ainur Rosyid, Hukum Adat (Resume), Jombang, 1984
- Bambang Ardiantoro dan Edi Priatmono, Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, Bahan Diklat tatalaksana Pengaturan Penguasaan Tanah, Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pertanahan Nasional, 2001, Jakarta.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Djambatan, 2003, Jakarta.
- Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Alumni, 1989, Bandung.
- Erman Rajagukguk, Butir-butir Hukum Ekonomi, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2011, Jakarta.
- George J. Aditjondro, Pemukiman Penduduk Secara Terpaksa Dalam Proyek-Proyek yang dibiayai Bank Dunia, Cetakan Pertama, terjemahan Michael M Cernea, *Involuntary Resettlement In Development Projects* World Bank, Technical Paper Number 80, 1990, Washington D.C.
- H.Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Cetakan 1, Alumni, 2004, Bandung.
- Hermayulis. Aspek-aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai Obyek Jaminan. Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Volume 10, 2000, Jakarta.
- John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, 1988, Jakarta.
- John W Creswell, Research Design: Qualitative & Quantitative Approach, 1993, London: Sage.
- M.Solly Lubis, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 2005, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implentasi, Jakarta, Kompas ,2006.
- Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni: 2000, Bandung.
- Mudhakhir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Umum,,Permata Aksara,2015, Jakarta.
- Nurhasanah Ismail, Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan, Setara Press, 2018, Malang.

- , Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, 2005, Yogyakarta.
- Oloan Sitorus, Carolina Sitepu dan Hernawan Suani, Pelepasan/penyerahan Hak sebagai cara pengadaan tanah. CV. Dasamedia Utama, 1995, Jakarta.
- Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, Yogyakarta.
- , Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penata Ruang Indonesia, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Grup, 2018, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, 1987, Surabaya.
- Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa – Suatu Pengantar, Fikahati Aneska, 2002, Jakarta.
- Rusmaadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, 1991, Bandung.
- Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT Citra Karya Aditiya Bhakti, 2000, Bandung.
- Sarjita, Teknis dan Strategi Mengelola Sengketa dan Memadukan Antara Teori dan Studi Empirik, Gramedia Pustaka Utama, 2005, Jakarta.
- Sindung Sitorus, Antonius Sriono, Oloan Sitorus, Buku Materi MKK 73529/3 SKS/Modul I-IX Kosolidasi Tanah, STPN Press, 2007, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, 2001, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty, 2011, Yogyakarta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, CV Alfabeta, 2008, Jakarta.
- , Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, 2009, Bandung.
- Suratman dan Phillipis Hadjon, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, 2014, Bandung.
- The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Sumber Sukses, 2002, Yogyakarta
- Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, 2005, Jakarta.
- Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, STPN Press, 2014, Yogyakarta.
- W.L Neuman, Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approach, 2003, London: Sage.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, 1986, Jakarta.

Y. Wartaya Winangun, SJ, Tanah Sumber Nilai Hidup, Cetakan 1, Kanisius, 2004, Yogyakarta.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan kedua, Sinar Grafika, 2011, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Peratama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No. 07/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advis Planning*) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/5648/Agr tanggal 9 Oktober 1985 tentang Petunjuk Teknis/Pedoman Pelaksanaan Konsolidasi Peratanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991  
Tentang Konsolidasi Tanah.

## **JURNAL**

Philip Oldenburg, *Land Consolidation as Land Reform in India*, World  
Development Vol.18 No. 2, 1990.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0305750X90900472>

Tony Kartono, *Praktek Pembebasan Tanah di DKI Jakarta Adakah Dasar  
Hukumnya?*, Jurnal hukum dan Pembangunan, 1979

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/736/663>

Mukmin Zakie, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan  
antara Malaysia dan Indonesia)*, Jurnal Hukum, 2011.

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7240>

Sulasi Rongiyati, *Eksistensi Lembaga Penilai Tanah Dalam Pengadaan Tanah  
Untuk*

*Kepentingan Umum*, Jurnal Negara Hukum Vol 3 No.1, 2012 .

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/221/162>

